



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2024

RENJA TAHUN 2025

KECAMATAN BRANGSONG
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Kata Pengantar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	34
2.3 Prestasi yang dicapai pada Tahun 2023	37
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	38
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	39
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	45
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Brangsong	50
3.3 Program dan Kegiatan	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	54
BAB V PENUTUP.....	75

Lampiran.

1. SK Bupati Kendal Nomor 050/66/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025
2. Data dukung prestasi yang dicapai Tahun 2023

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel T-C.29 :	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2024	24
Tabel T-C.30 :	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	37
Tabel T-C.31 :	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	42
Tabel T-C.33 :	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	52

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas kasih dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025.

Keberadaan rencana kerja ini merupakan suatu langkah awal bagi kecamatan Brangsong dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan sasaran daerah yang ingin diwujudkan dan dijadikan sasaran jangka menengah Kecamatan Brangsong yaitu ***“Meningkatkan kualitas pelayanan publik”***

Diharapkan rencana kerja ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam setiap pengambilan langkah maupun kebijakan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Dengan demikian akan terciptakan keterpaduan dan kesinambungan dalam pelaksanaan program-program kerja guna tercapainya visi dan misi Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Di masa mendatang, sangat diharapkan pula masukan dan sasaran perbaikan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan rencana kinerja periode selanjutnya.

Akhir kata, Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Brangsong Kabupaten Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik kami harapkan untuk penyempurnaan ke depannya.

Brangsong, Agustus 2024

CAMAT BRANGSONG



YUNAN ARIEF RAKHMAN, ST, MT

Pembina Tk. I

NIP. 19730629 200501 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Brangsong sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Brangsong Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Brangsong Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis guna mewujudkan visi misi Bupati Kendal yaitu *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan”*, dan pada akhirnya ditujukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kendal.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 dan tahun berjalan 2024, serta memuat program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025. Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang memuat daftar rencana program kegiatan Tahun 2024, maka proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ini juga dilakukan secara top down dan bottom up, yaitu memadukan antara hasil kajian prioritas kebutuhan program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah atasan dan dokumen Renstra Kecamatan Brangsong serta RPJMD Kabupaten Kendal yang telah ditetapkan.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan, dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, Renja merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang –

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
23. Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2024 tentang RKPD 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal 2025 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu Tahun anggaran sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Brangsong 2021-2026 dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana program dan kegiatan prioritas Tahun 2025.

Adapun Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Brangsong ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Pemerintah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dalam menentukan prioritas program dan kegiatan (Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) Tahun 2025;
2. Menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Kecamatan Brangsong dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Brangsong Tahun 2025;
3. Menyediakan satu acuan bagi Pemerintah Kecamatan Brangsong dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) Tahun Anggaran 2025;
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Brangsong dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026;
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Pemerinah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penyusunan.

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, analisis kinerja pelayanan Kabupaten Kendal, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal pada Tahun 2025

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Brangsong. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Brangsong menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Brangsong selama Tahun 2023 dan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Brangsong Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Merupakan program yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan umum administrasi sebagai fungsi penunjang kinerja

pelaksanaan kegiatan pelayanan serta administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 1.261.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.261.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah dokumen
keluaran perencanaan Perangkat
Daerah yang disusun
3. Target capaian kegiatan : 6 dokumen
4. Realisasi capaian kegiatan : 6 dokumen
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 800.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 800.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah laporan capaian
keluaran kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
3. Target capaian kegiatan : 4 laporan
4. Realisasi capaian kegiatan : 4 laporan
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 4.700.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 4.700.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%

2. Indikator kinerja capaian : Jumlah laporan evaluasi
keluaran kinerja Perangkat Daerah
3. Target capaian kegiatan : 1 laporan
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 laporan
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Dengan realisasi anggaran sebesar 100% dokumen perencanaan yang dibutuhkan, Laporan hasil Evaluasi Kinerja sudah tersusun dan terlaksana.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan antara lain:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 1.666.953.320,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.576.064.073,-
Realisasi Anggaran (%) : 95,18%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah orang yang menerima
keluaran Gaji dan Tunjangan ASN
3. Target capaian kegiatan : 14 orang/bulan
4. Realisasi capaian kegiatan : 14 orang/bulan
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Gaji dan tunjangan ASN dengan capaian kinerja 100 % , namun realisasi anggaran 95,18 % disebabkan karena adanya ASN yang pensiun, kekosongan pejabat struktural dan mutasi ASN

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 88.600.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 88.600.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen Hasil
keluaran Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

3. Target capaian kegiatan : 1 laporan
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 laporan
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Capaian kinerja dan realisasi keuangan sudah sesuai karena honor yang dibayarkan sesuai dengan yang dianggarkan.

3) Administrasi Umum, dengan sub kegiatan antara lain:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 5.150.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 4.686.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 90,99%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket Komponen
keluaran Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 1 paket
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 paket
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Kebutuhan alat listrik selama satu tahun sudah sesuai dengan yang dianggarkan, hal tersebut didukung dengan efisiensi penggunaan lampu dan komponen listrik lainnya.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 27.177.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 27.022.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 99,43%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket Peralatan dan
keluaran Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 12 paket
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 paket

5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Penyediaan kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas di kecamatan sudah dipenuhi.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 14.398.600,-
Realisasi Anggaran : Rp. 12.768.600,-
Realisasi Anggaran (%) : 88,68%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket Peralatan
keluaran Rumah Tangga yang
Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 12 paket
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 paket
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Penyediaan kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga untuk menunjang pelaksanaan tugas di kecamatan sudah dipenuhi.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 22.239.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 21.275.500,-
Realisasi Anggaran (%) : 95,67%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket Bahan Logistik
keluaran Kantor yang Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 12 paket
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 paket
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Penyediaan kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kanto untuk menunjang pelaksanaan tugas di kecamatan sudah dipenuhi.

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 9.591.200,-

- | | | |
|------------------------|---|-----------------|
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 6.599.400,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 68,81% |
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
 3. Target capaian kegiatan : 12 paket
 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 paket
 5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, indikator kinerja antara lain:
- | | | |
|------------------------|---|-----------------|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 2.400.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 2.400.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 100% |
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan yang Disediakan
 3. Target capaian kegiatan : 12 dokumen
 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 dokumen
 5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%
- Paket barang cetakan dan penggandaan stop map, amplop dan fotocopi sudah terpenuhi dengan realisasi anggaran 100%.
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, indikator kinerja antara lain:
- | | | |
|------------------------|---|------------------|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 98.737.300,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 89.626.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 90,77% |
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 3. Target capaian kegiatan : 12 laporan
 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 laporan

5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

SPPD luar daerah tidak terserap 100 % disebabkan adanya reefisiensi anggaran yang tidak diperbolehkannya melaksanakan rapat diluar daerah.

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:

a. Pengadaan Mebel, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 8.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 7.810.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 97,63%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket Mebel yang keluaran Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 5 paket
4. Realisasi capaian kegiatan : 5 paket
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Pengadaan yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sudah dipenuhi .

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 10.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 9.940.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 99,40%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Unit Peralatan dan keluaran Mesin Lainnya yang Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 2 unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 2 unit
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Pengadaan peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sudah dipenuhi .

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan antara lain:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 3.500.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 3.500.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan Penyediaan
keluaran Jasa Surat Menyurat
3. Target capaian kegiatan : 12 laporan
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 laporan
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Kebutuhan materai untuk pembuatan SPJ selama satu tahun sudah dipenuhi .

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 60.075.500,-
Realisasi Anggaran : Rp. 57.855.295,-
Realisasi Anggaran (%) : 96,30%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan Penyediaan
keluaran Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 12 laporan
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 laporan
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Pembayaran rekening listrik , telepon dan wifi sesuai dengan tagihan rekening untuk kebutuhan dalam satu tahun.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 138.840.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 138.790.037,-
Realisasi Anggaran (%) : 99,96%

2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan Penyediaan
keluaran Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 12 laporan
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 laporan
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Pembayaran honor bagi tenaga TPK sudah dilaksanakan 12 bulan sesuai dengan SBU Kabupaten Kendal ,honor TPK Kecamatan Brangsong sebanyak 5 orang.

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 32.919.200,-
Realisasi Anggaran : Rp. 28.815.750,-
Realisasi Anggaran (%) : 87,53%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Kendaraan Dinas
keluaran Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
3. Target capaian kegiatan : 14 unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 14 unit
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Pembayaran pajak kendaraan dinas sebanyak 16 unit sudah dilaksanakan sesuai waktu perpanjangan masing-masing kendaraan dinas dan sudah dilakukan pemeliharaan kendaraan dinas sesuai kebutuhan.

- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 10.500.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 9.800.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 93,33%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Peralatan dan Mesin
keluaran Lainnya yang Dipelihara
3. Target capaian kegiatan : 14 unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 14 unit
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Pemeliharaan komputer dan printer selama 1 tahun telah dilaksanakan termasuk penggantian keyboard laptop dan komputer, serta servis printer, scanner.

c. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 49.776.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 99,55%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Gedung Kantor dan
keluaran Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
3. Target capaian kegiatan : 2 unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 2 unit
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Pemeliharaan kantor dinas untuk Pemlesteran ulang tembok yang retak serta pengecatan gedung kantor Kecamatan Brangsong.

d. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 33.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 30.280.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 91,76%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Unit Sarana dan
keluaran Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan

- 3. Target capaian kegiatan : 4 unit
- 4. Realisasi capaian kegiatan : 4 unit
- 5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Servise AC dan Kipas angin harus dilakukan secara berkala setiap tahunnya, ada juga yang perlu diperbaiki.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 2 (dua) kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, terdapat 1 (satu) sub kegiatan:

- a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan, indikator kinerja antara lain:

- 1. Pagu Anggaran : Rp. 3.800.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 3.800.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
- 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan Fasilitasi
keluaran Percepatan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal di
Wilayah Kecamatan
- 3. Target capaian kegiatan : 1 laporan
- 4. Realisasi capaian kegiatan : 1 laporan
- 5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Sosialisasi Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Brangsong ditelah dilaksanakan dengan mengundang dari unsur desa dan masyarakat.

- 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, terdapat 1 (satu) sub kegiatan:

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerinahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, indikator kinerja antara lain:

- 1. Pagu Anggaran : Rp. 10.320.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 10.320.000,-

- Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen Non
keluaran Perizinan Usaha yang
Dilaksanakan
3. Target capaian kegiatan : 1 dokumen
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 dokumen
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Sosialisasi pengajuan ijin usaha telah dilaksanakan dengan mengundang dari unsur desa dan UMKM.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan:

- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan :

- a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan indikator kinerja adalah :

1. Pagu Anggaran : Rp. 10.595.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 10.595.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Lembaga
keluaran Kemasyarakatan yang
Berpartisipasi dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
3. Target capaian kegiatan : 12 lembaga
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 lembaga
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Musrenbangcam sudah dilaksanakan dengan mengundang semua unsur dalam Musrenbangcam sebanyak 100 orang, dan peserta yang dihadiri sebanyak 100 orang.

b) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, dengan indikator kinerja adalah :

1. Pagu Anggaran : Rp. 9.350.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 9.350.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Sinkronisasi Program
keluaran Kerja dan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat
yang Dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta di
Wilayah Kerja Kecamatan
3. Target capaian kegiatan : 1 dokumen
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 dokumen
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Kegiatan Lomba MTQ tingkat Kecamatan sudah dilaksanakan sesuai jadwal.

c) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan indikator kinerja adalah :

1. Pagu Anggaran : Rp. 30.355.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 24.635,000,-
Realisasi Anggaran (%) : 81,16%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah laporan Peningkatan
keluaran Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
3. Target capaian kegiatan : 1 dokumen
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 dokumen
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Kegiatan Pleno dan Raker PKK sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan program kerja yang telah disusun oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Brangsong.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

1) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan :

a) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan indikator kinerja adalah :

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 83.304.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 83.291.448,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 99,98% |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 laporan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 laporan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 100% |

Honor Linmas sebanyak 3 orang selama 12 bulan sudah dibayarkan sesuai Standar Biaya Umum Kabupaten Kendal.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan :

a) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 26.875.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 25.525.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 94,98%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Orang yang Mengikuti
keluaran Fasilitasi, Koordinasi dan
Pembinaan (Bimtek,
Sosialisasi, Konsultasi)
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
3. Target capaian kegiatan : 50 orang
4. Realisasi capaian kegiatan : 50 orang
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Pembinaan Linmas desa dalam menghadapi musim penghujan dan rawan terjadi bencana alam diwilayah Kecamatan Brangsong telah dilaksanakan yang diikuti linmas desa Se-Kecamatan Brangsong.

b) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dengan indikator kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 20.300.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 20.300.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah orang yang mengikuti
keluaran Pembinaan Persatuan dan
Kesatuan Bangsa
3. Target capaian kegiatan : 50 orang
4. Realisasi capaian kegiatan : 50 orang
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Sosialisasi Pemberantasan rokok ilegal tanpa Cukai di wilayah Kecamatan Brangsong telah dilaksanakan yang diikuti masyarakat desa Se-Kecamatan Brangsong.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, terdiri dari 1 (satu) kegiatan :

1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan antara lain:

a) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan indikator kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 6.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 6.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen yang keluaran Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3. Target capaian kegiatan : 12 lembaga
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 lembaga
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Pendampingan Penyusunan Perdes dan Perkades sudah dilaksanakan dan 12 desa sudah menyusun Perdes dan Perkades.

b) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 21.810.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 21.310.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 97,71%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen yang keluaran Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
3. Target capaian kegiatan : 12 dokumen
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 dokumen
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Monev capaian PBB, administrasi umum, administrasi pembangunan, administrasi keuangan, pertanggung jawaban keuangan desa sudah dilaksanakan di 12 desa.

c) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan indikator kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 31.891.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 29.791.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 93,42%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen Fasilitasi
keluaran dalam rangka Program dan
Pelaksanaan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
3. Target capaian kegiatan : 1 dokumen
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 dokumen
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Sosialisasi Peningkatan Peran BUMDESa telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Perangkat desa dan anggota BUMDESa Se Kecamatan Brangsong sejumlah 54 Orang.

Adapun gambaran penggunaan anggaran Kecamatan Brangsong Tahun 2023, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.532.522.120,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), terserap anggaran sebesar Rp. 2.417.367.139,- (Dua milyar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) dengan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 115.154.981,- (Seratus lima belas juta seratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) merupakan penghematan. Keseluruhan anggaran yang terserap telah dipergunakan untuk mendanai keseluruhan program kegiatan Kecamatan Brangsong Tahun 2023 dan telah dipertanggung jawabkan penggunaannya

Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun lalu berjalan (2024) dan capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sampai dengan output kegiatan tahun 2023.

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)
Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Ralisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	75%
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah									
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	-	24 dokumen	80%
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4 dokumen	-	4 laporan	4 laporan	100%	-	4 dokumen	25%

		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 kegiatan	-	1 laporan	1 laporan	100%	-	1 Kegiatan	58%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	100%	15 Orang/bulan	45 Orang/bulan	60%
	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	-	24 dokumen	40%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	1 paket	1 paket	100%	12 paket	25 paket	41,67%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 paket	60%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 paket	6 paket	6 paket	100%	12 paket	30 paket	50%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 paket	60%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 paket	60%

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	-	24 dokumen	40%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 dokumen	36 laporan	60%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	4 unit	5 unit	5 unit	100%	-	9 unit	42,85%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	8 Unit	2 unit	2 unit	100%	-	10 unit	71,42%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	7 Unit	4 unit	4 unit	100%	5 unit	16 Unit	133%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	16 Unit	14 unit	14 unit	100%	14 unit	44 unit	52,38%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	14 unit	14 unit	14 unit	100%	18 unit	46 Unit	65,71%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	2 unit	2 unit	100%	1 unit	4 Unit	80%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	100%	18 unit	54 unit	60%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	89	166	85	88	100%	87	341	66,34%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh									

	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	- laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	-	1 laporan	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	50%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	59	68	56	9	16%	58	135	39,58%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 lembaga	12 lembaga	12 lembaga	12 lembaga	100%	12 lembaga	36 lembaga	60%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	66,67%

	di Wilayah Kerja Kecamatan	Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	1 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	2 laporan	6 laporan	75%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	85	152	81	79	95%	83	314	64,34%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12 laporana	-	-	-	1 laporan	13 laporan	21,67%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%

	Negara Republik Indonesia	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	83	149	79	77	97%	80	306	63,88%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang	-	50 orang	50 orang	100%	-	50 orang	100%
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100%	55 orang	155 orang	62%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	200	100	100	100%	100	400	80%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									

	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 dokumen	12 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	36 dokumen	60%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	15 dokumen	83,3%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	15 dokumen	83,3%
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	2 dokumen	200%

Dari data sebagaimana tabel 2.1 diatas, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 Kecamatan Brangsong adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi hasil pelaksanaan Renja 2023 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang dilaksanakan 1 (satu) urusan, 6 (enam) Program dan Indikator Kinerja Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan Indikator kinerja kegiatannya
 - b) Dari 6 (enam) indikator kinerja program, terdapat 1 (satu) indikator kinerja program yang tidak memenuhi target, yaitu Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD. Dari target usulan aspirasi masyarakat yaitu 56 (lima puluh enam) hanya 9 (Sembilan) yang dapat diakomodir atau 16 %
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024. Dari 6 (enam) indikator kinerja program dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan, masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Didalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal, Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;

- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. fasilitasi;
- f. penetapan;
- g. penyelenggaraan; dan
- h. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

- dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan sebagaimana tersebut diatas, Camat selaku Pimpinan Kecamatan juga melaksanakan pendelegasian kewenangan yang diberikan Bupati sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kendal kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah. Sebagian kewenangan yang dilimpahkan tersebut meliputi 20 bidang yaitu : pengembangan otonomi daerah; perimbangan keuangan daerah; perekonomian; pertamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan; permukiman; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan; sosial dan kesejahteraan rakyat; pertanahan; pertanian tanaman pangan; perkebunan dan kehutanan; peternakan; perikanan dan kelautan; pertambangan umum; pekerjaan umum; pengairan; penataan ruang; perindustrian dan perdagangan; lingkungan hidup serta bidang pemuda dan olah raga.

Kecamatan Brangsong sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 mempunyai tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, namun pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Brangsong sebatas pada pemberian legalisasi Camat yang kemudian ditangani oleh Instansi lain, pelayanan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, SKCK oleh Polsek dan Polres, sebagian perijinan yang berskala kecil yaitu Ijin Mendirikan Bangunan dengan luasan bangunan kurang dari 100 m², sedangkan perijinan yang berskala besar dilaksanakan oleh DPMPT-SP dan sebagainya, artinya baik

buruknya pelayanan masyarakat pada proses pelayanan tersebut secara langsung yang mendapat aduan atau ketidak puasan atas pelayanan publik adalah Kecamatan, untuk itu perlu bersinergi dengan instansi terkait, dan melakukan kiat - kiat serta strategi dalam peningkatan pelayanan, misalnya kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan, upaya jemput bola dengan sosialisasi ke desa-desa, pemeliharaan perangkat komputer agar selalu siap untuk melaksanakan kegiatan pelayanan.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	74	75	77	80	71,10	-	77	80	
		Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM	85	87	89	90	88,86	-	89	90	

Berdasarkan data dari tabel dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan pada tahun 2023 adalah 88,86 dibandingkan dengan target kinerja sebesar 85 atau terdapat selisih lebih 5 dari target tahun 2022. Sedangkan Capaian kinerja indikator Nilai SAKIP Kecamatan pada tahun 2023 adalah 71,10 dari target kinerja sebesar 74 atau terdapat selisih lebih 3 dari target tahun 2023.

2.3 Prestasi yang dicapai pada tahun 2023

Prestasi merupakan hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang diusahakan. Capaian yang diraih Kecamatan Brangsong pada Tahun 2023, yaitu:

1. Piagam Penghargaan atas Hasil Laporan Pengawasan Kersipan Internal Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal (terlampir).
2. Menjadi salah satu Unit Lokus Evaluasi (ULE) dalam pelaksanaan Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yg diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Setda Kab Kendal dengan nilai indeks 4,29 atau dengan predikat A- untuk layanan administrasi (terlampir).

2.4 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Brangsong tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Brangsong, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Brangsong sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kinerja pelayanan Kecamatan Brangsong terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Brangsong sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai.
2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Rencana Kerja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak.
3. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang optimal.
4. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaporan kepada pemerintah atasan.
5. Disiplin aparatur yang belum optimal
6. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.

7. Pelimpahan wewenang yang hanya sebagian kecil mengingat kecamatan merupakan suatu wilayah.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kinerja pelayanan PD lebih dahulu harus dimengerti tentang kondisi PD, kondisi masyarakat tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat didalam menerima program-program Pemerintah . Kecamatan Brangsong adalah kecamatan dengan kondisi yang dapat dikatakan minimalis mulai dari personil, fasilitas dan sarana prasarana perkantoran. Dengan kondisi semacam itu maka pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan minimal, itupun belum memenuhi kriteria terutama pada fasilitas pelayanan yang belum didukung adanya ruang laktasi, sarana untuk disabilitas dan posko pengaduan, sehingga pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD. Bahwa di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Brangsong terdapat banyak permasalahan dan hambatan seperti telah diuraikan di atas.

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, difokuskan pada peningkatan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di desa.

3. Dampak terhadap pencapaian program Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional, seperti SPM dan isu strategis saat ini antara lain:

- Belum optimalnya pemerataan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah pendukung perekonomian;
- Belum optimalnya ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
- Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis pada industri, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif;

- Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka;
- Masih terdapatnya kesenjangan dan ketimpangan wilayah;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang handal, berkarakter dan berdaya saing;
- Peningkatan Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang handal, reformasi birokrasi, smart city dan inovasi daerah.

Bupati Kendal selalu menekankan bahwa di dalam pencapaian program Kepala Daerah selalu disinergikan dengan Program nasional seperti SPM dan isu strategis dengan selalu mengawasi perkembangannya.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD Kecamatan Brangsong adalah :

- Dengan peningkatan disiplin PNS, peningkatan kinerja PNS dengan melakukan tugas yang riil dan terukur.
- Selektif memilih program/kegiatan dalam rangka peningkatan fasilitas, sarana prasarana kantor
- Evaluasi semua kegiatan pelayanan

Dengan demikian peluang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan

5. Formula isu-isu penting rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

- Setiap personil yang terlibat dalam perencanaan hendaknya menyadari dan mempunyai cara pandang kedepan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan Perangkat Daerah
- Eksplorasi potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan Bekerja sama dengan tenaga ahli dalam mengelola sumberdaya yang ada
- Evaluasi kegiatan, untuk menentukan sikap selanjutnya

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kecamatan Brangsong Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji dalam Tabel T-C. 31

Tabel T-C. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Brangsong

No	Rancangan Awal RKPD (materi RKPD Tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (materi RKPD Tahun 2025)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	Kecamatan Brangsong	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100%	2.393.929.548	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	Kecamatan Brangsong	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100%	5.403.295.548	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Brangsong	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	89%	2.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Brangsong	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	89%	1.500.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	Kecamatan Brangsong	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	59%	31.350.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	Kecamatan Brangsong	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	59%	27.034.000	

4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Brangsong	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	85%	103.550.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Brangsong	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	85%	102.200.000	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Brangsong	Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani	83%	14.025.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Brangsong	Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani	83%	14.025.000	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Brangsong	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	5.900.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Brangsong	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	3.000.000	
					2.550.754.548					5.550.754.548	

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/kegiatan dari masyarakat pada umumnya tercantum dalam kegiatan Musrenbangcam, yaitu kegiatan untuk kepentingan umum, serta sarana prasarana pelayanan lainnya. Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Namun dalam hal ini Kecamatan Brangsong tidak bisa menerima Usulan dari Masyarakat langsung karena keterbatasan anggaran dan wewenang dari Kecamatan Brangsong itu sendiri.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

- **Arah Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang merupakan masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045 sekaligus penjabaran awal dari RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. Rencana Kerja Pemerintah 2025 mempunyai tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi :

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

- **Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tidak lepas dari prioritas pembangunan provinsi jawa tengah. Prioritas pembangunan provinsi jawa tengah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif serta inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif;
5. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif. melalui perluasan jejaring dan Kerjasama daerah.

- **Arah Kebijakan Kabupaten Kendal Tahun 2025**

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah “**Kendal *Inclusive***” dengan prioritas pada “**Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan**”. Arah kebijakan ini fokus pada penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi, dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 ditekankan pada:

1. Memperkuat kualitas jalan melalui peningkatan kelas jalan, dan peningkatan pemeliharaan jalan;
2. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanganan bencana;
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

4. Meningkatnya pengelolaan sampah;
5. Meningkatnya layanan angkutan jalan;
6. Meningkatnya ketahanan pangan;
7. Menurunnya kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka;
8. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia;

Disamping program prioritas diatas, Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat mainstreaming yaitu pembangunan gender, stunting dan kemiskinan. Isu gender tidak hanya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan saja, tetapi dilaksanakan oleh hampir semua Perangkat Daerah. Penyelesaian kesetaraan dan keadilan gender dilakukan berdasarkan isu gender di masing-masing Perangkat Daerah dengan tidak mengubah struktur anggaran.

Isu stunting juga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana rencana aksi penanggulangan stunting. Penyebab terjadinya stunting dari ekonomi, sosial dan infrastruktur yang perlu juga mendapat dukungan dari Dana Desa.

Isu kemiskinan diselesaikan oleh banyak Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelesaian kemiskinan akan diseleraskan dengan dokumen Rencana Penanganan Kemiskinan Daerah.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Singorojo Tahun 2025 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Renja Kecamatan Singorojo tahun 2025 apabila dibandingkan dengan kebijakan Pusat dan Provinsi diuraikan pada Tabel 3.1, sebagai berikut :

Tabel 3.1. Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2025

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Kendal	Program/kegiatan dalam Renja 2025
✓ Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) ✓ Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru. ✓ Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. ✓ Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan,	✓ Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas ✓ Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata ✓ Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan ✓ Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	✓ Memperkuat kualitas jalan melalui peningkatan kelas jalan, dan peningkatan pemeliharaan jalan; ✓ Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanganan bencana; ✓ Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; ✓ Meningkatnya pengelolaan sampah; ✓ Meningkatnya layanan angkutan jalan; ✓ Meningkatnya ketahanan pangan ✓ Menurunnya kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. ✓ Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatn/Kota ✓ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ✓ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ✓ Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ✓ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ✓ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. ✓ Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri ✓ Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan ✓ Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan ✓ Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur			
---	--	--	--

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Brangsong

Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Brangsong Tahun 2025 pada prinsipnya merupakan bagian dari tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Brangsong tahun 2021-2026. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Memaksimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif

Dengan Sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;

- 2) Meningkatkan kualitas mental dan kepribadian masyarakat yang beriman dan bertakwa.

Dengan sasaran: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;

- 3) Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat.

Dengan sasaran: Meningkatnya partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan melalui pemberdayaan Karang Taruna dan PKK;

- 4) Meningkatkan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, rasa ketentraman dalam masyarakat, dan solidaritas dan toleransi inter dan antar umat beragama.

Dengan sasaran: Terwujudnya kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah yang mantap serta kondusif;

- 5) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan prima dan kinerja pemerintah kecamatan yang responsif, professional dan akuntabel.

dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat;
- b. Terpenuhinya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kecamatan;
- c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan;

- d. Meningkatnya kemampuan, disiplin serta kesejahteraan aparatur pemerintahan kecamatan dan desa

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Brangsang
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	skor	89
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	skor	77

3.3 Program dan Kegiatan

Rancangan awal RKPD menjadi acuan tahunan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra PD menjadi pedoman jangka menengah lima tahunan dalam menjabarkan tujuan dan sasaran dalam program/kegiatan yang selaras dengan rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru demi tercapainya sasaran pada Renstra PD. Usulan program serta kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja PD dengan mengakomodir aspirasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD sehingga kebutuhan pendanaan dapat diselaraskan.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Brangsong Tahun 2025 ini juga dalam rangka sinkronisasi terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyelarasan yang dilakukan melalui proses pemetaan dengan menyandingkan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada. Masa peralihan ini masih mempedomani RPJMD serta Renstra yang dijabarkan pada Renja PD Tahun 2025 dan merupakan tahun ke-5 atau tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 .

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kendal

Nama PD : Kecamatan Brangsong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Brangsong	100 %	5.403.295.548	PAD & DAU			2.488.487.500
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Kecamatan Brangsong	89 %	1.200.000	PAD			6.000.000

7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang	Kecamatan Brangsong	59 %	27.034.000	PAD			40.350.000
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Kecamatan Brangsong	85 %	102.200.000	PAD			105.550.000
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani	Kecamatan Brangsong	83 %	14.025.000	PAD			17.500.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	Kecamatan Brangsong	100%	3.000.000	PAD			7.000.000
							5.550.754.548				2.664.887.500

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Kecamatan Brangsong Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan yang berisikan rencana pembangunan tahunan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Prioritas Program dalam Rencana Kerja Kecamatan Brangsong Tahun 2025 terdiri dari 6 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Rencana Kerja ini berisi program dan kegiatan prioritas guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui dan mengakomodir prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun

2025. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja ini bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun yang dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat diselaraskan.

Adapun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Tahun 2025 mulai dari program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat di lampiran I

Tabel 4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Kecamatan Brangsong Kab. Kendal
Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BRANGSONG						2.649.725.593,00							2.674.887.500,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.649.725.593,00							2.674.887.500,00	
	7.01	KECAMATAN						2.649.725.593,00							2.674.887.500,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100.00 %			100.00 %	2.496.191.593,00						100.00 %	2.498.487.500,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	1.926.120.593,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kecamatan	-	2.061.811.500,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/bulan	1.926.120.593,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kecamatan		2.061.811.500,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor</i>	-			100 %	219.816.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kecamatan	-	161.341.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4.567.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kecamatan		5.941.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	23.256.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kecamatan		0,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	13.243.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kecamatan		13.400.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.803.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kecamatan		7.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	8.436.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kecamatan		9.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	164.511.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kecamatan		125.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan yang diadakan	-			13 Unit	34.050.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel	ASN Kecamatan	-	10.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	8.550.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel	ASN Kecamatan		10.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.500.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel	ASN Kecamatan		0,00	KECAMATAN BRANGSONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Bulan tersedianya jasa kantor</i>	-			12 Bulan	234.925.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kecamatan	-	224.225.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	3.500.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kecamatan		4.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	70.025.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kecamatan		61.225.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	161.400.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kecamatan		159.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah aset yang dipelihara</i>	-			45 Unit	81.280.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kecamatan	-	41.110.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				16 Unit	19.500.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kecamatan		19.600.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5.680.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kecamatan		10.710.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kecamatan		0,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	6.100.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kecamatan		10.800.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	90 %			89 %	1.200.000,00						90 %	6.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	-			1 Kegiatan	1.200.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat	-	6.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat		6.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD</i>	59 %			59 %	27.034.000,00						59 %	40.350.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa</i>	-			12 Desa	27.034.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat	-	40.350.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarak atan	7.500.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pambang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Peningka tan kapasitas p erekonomia n yang berdaya saing dan b erkelanjuta n berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat		8.250.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	10.034.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pambang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Peningka tan kapasitas p erekonomia n yang berdaya saing dan b erkelanjuta n berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkata n tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat		15.600.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	9.500.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat		16.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	85 %			85 %	102.200.000,00						85 %	105.550.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan trantibum	-			12 Desa	6.800.000,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat	-	10.150.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	6.800.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat		10.150.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan perda</i>	-			12 Dokumen	95.400.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-	-	95.400.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	95.400.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-		95.400.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	83 %			83 %	20.100.000,00						83 %	17.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	-			4 Kegiatan	20.100.000,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat	-	17.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>				55 Orang	20.100.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat		17.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase penyusunan APBDes tepat waktu</i>	100 %			100 %	3.000.000,00						100 %	7.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Fasilitasi Pembinaan pengawasan Pemerintah Desa</i>	-			12 Desa	3.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Desa	-	7.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Dokumen	600.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Desa		2.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Desa		3.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Desa		2.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG		
	J U M L A H							2.649.725.593,00								2.674.887.500,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabuapten Kendal Tahun 2021–2026 serta memeperhatikan Rencana Strategis Kecamatan Brangsong Tahun 2021–2026.

Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Rencana Kerja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan Kecamatan Brangsong. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Brangsong Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Brangsong pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Kendal;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Brangsong ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Brangsong Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Brangsong;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Brangsong ini juga berpedoman pada RKPD Brangsong Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Brangsong Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung

jawab seluruh pegawai Kecamatan Brangsong, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Kendal.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Brangsong Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Brangsong pada Tahun Anggaran 2025.

Brangsong, Agustus 2024
CAMAT BRANGSONG



YUNAN ARIEF RAKHMAN, ST, MT

Pembina

NIP. 19730629 200501 1 003



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ 37 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 237);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :
 - a. memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025;
 - b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025 dalam pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
 - c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025.
2. Sekretaris bertugas :
 - a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025.
3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025.
4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemerintahan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025.
5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang ketenteraman dan ketertiban dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025.
6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025.
7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum bertugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi bidang pelayanan umum dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025.
8. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketenteraman dan Keterlibatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 15 Februari 2024

BUPATI KENDAL



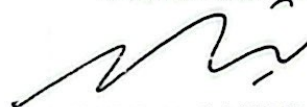
DICO M GANINDUTO

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
- 2. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
- 3. Seluruh Anggota Tim yang bersangkutan;
- 4. Asip. _____

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	2	3	4
6.	Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Brangsong	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Brangsong	Anggota	1. Kanafi; dan 2. Dwi Rivaldi
7.	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum		
	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Brangsong	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Brangsong	Anggota	- M. Abdul Rahman Wahid.

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 050 / 37 / 2024

TANGGAL : 15 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Brangsong	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Brangsong	Sekretaris	
3.	Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan		
	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Brangsong	Koordinator Kelompok Kerja	
	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Brangsong	Anggota	
	Pelaksana pada Kecamatan Brangsong	Anggota	1. Agni Nurmala Vita, A.Md; 2. Hary Santoso; 3. Muchyidin, A.Md.Kom; dan 4. Mulyadi
4.	Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan		
	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Brangsong	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Brangsong	Anggota	1. Nur Patoni; dan 2. Siti Nur Azizah.
5.	Kelompok Kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban		
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Brangsong	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Brangsong	Anggota	- Bayu Pamungkas



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno – Hatta 193 Telp. (0294) 381251 – 381252 Fax. (0294) 381062 Kendal 51313
e-mail: bag.organisasi@kendalkab.go.id website: www.kendalkab.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 060/909/Organ
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Hasil Pemantauan dan
Evaluasi Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (PEKPPP)
Tahun 2023

Kendal, 08 Desember 2023

Kepada

Yth. 1. Kepala Dinas Sosial Kab. Kendal
2. Direktur RSUD dr. H. Soewondo
Kendal
3. Camat Brangsong

di_
KENDAL

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/404/PP.02/2023 tanggal 24 November 2023 perihal Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 795 Tahun 2023 sebagaimana terlampir, kami sampaikan bahwa nilai Indeks Pelayanan Publik Unit Lokus Evaluasi (ULE) dan indeks pelayanan publik Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

No.	Unit Lokus Evaluasi (ULE)	Layanan	Indeks	Keterangan
1.	Kecamatan Brangsong	Administrasi	4,29	A-
2.	Dinas Sosial	Barang	4,45	A-
3.	RSUD dr. H. Soewondo	Jasa	4,51	A

Berdasarkan rata-rata nilai diatas, maka Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebesar **4,42 (A-)**.

Demikian, disampaikan terima kasih atas upaya dan kerjasama pada saat pelaksanaan PEKPPP 2023, semoga hasil ini dapat terus ditingkatkan sehingga memberikan dampak positif bagi perbaikan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

a.n. BUPATI KENDAL
Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

Ir. SUGIONO, MT.
Pembina Utama Madya
NIP. 196409281993031004



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
SEKRETARIAT DAERAH



PIAGAM PENGHARGAAN
Nomor : 045.4.1 / **2863** / DINARPUS

Diberikan kepada :

KECAMATAN BRANGSONG
PREDIKAT B (BAIK)

ATAS HASIL LAPORAN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2023
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Kendal, **19** Oktober 2023

an Bupati Kendal
Sekretaris Daerah



Ir. SUGIONO, MT

bangga